

**Prospek Kerjasama AHA Centre (Asean Human Assistance) Dalam Bidang
Penanggulangan Bencana Alam Di Asia Tenggara**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

M. Mirza Ikhwan

E 131 07 053

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2013

ABSTRAKSI

M. Mirza Ikhwan , **E 131 07 053** dengan skripsi berjudul “*Prospek Kerjasama AHA Centre (ASEAN Human Assistance) Dalam Bidang Penanggulangan Bencana Di Asia Tenggara*” di bawah bimbingan **Munjin Syafik Asy’ari** selaku pembimbing I dan **Aspiannor Masrie** selaku pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek kerjasama AHA Center dalam penanggulangan bencana alam di kawasan Asia Tenggara. Sekaligus untuk mengetahui bagaimana strategi AHA Center dalam penanggulangan bencana alam di kawasan Asia Tenggara dengan menganalisis peluang dan tantangan kerjasama AHA Centre.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang berupa telaah pustaka. Pengambilan data diolah dari buku, jurnal, laporan tertulis, majalah dan dokumen-dokumen lainnya. Data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ASEAN dan AHA Centre dalam menjalankan kerjasamanya diarahkan untuk menjaga stabilitas kawasan terhadap bencana alam. Keterlibatan mitra dialog ASEAN dalam upaya peningkatan kapasitas AHA Centre, telah memberi harapan dalam mengefektifkan proses pengkoordinasian situasi darurat terhadap seluruh negara anggota, koordinasi yang menjadi salah satu kunci tercapainya proses penanggulangan bencana yang efektif di kawasan Asia Tenggara.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, saya dapat menyelesaikan skripsi maha super dahsyat ini. Namun hal tersebut tidak lepas dari dukungan moral dan materi dari beberapa orang penting dalam hidup saya, yaitu:

1. Orang tua saya, Bapak, Ibu, Bapak Amir, dan Mama Citra atas dukungan dan kesabarannya selama ini mendampingi saya.
2. Kakak dan dua orang adik saya.
3. Dosen Pembimbing I Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si dan Dosen Pembimbing II Drs. Aspiannor Masrie.
4. Seluruh jajaran dosen dan staf Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang saya hormati.
5. *Partner in crime* menggarap skripsi dari awal, M. Jasmin.
6. Seluruh Timnas Empire 2007.
7. Geng Nero.
8. Keluarga Besar HIMAH I yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
9. Amdya Mashfufah Hisyam, sebagai musuh bebuyutan yang selalu saya kejar kemanapun. Terima kasih atas pertarungannya selama 4 tahun ini.

Dalam ini skripsi ini masih terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sila menghubungi email saya

(mirza.ikhwan@gmail.com) jika menemukan kesalahan dalam skripsi ini. Terima kasih.

What is you hate the most, perhaps is a thing that good for you.

Makassar, 23 Agustus 2013

Muhammad Mirza Ikhwan

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Association South Asia Nation (ASEAN)	18
B. Organisasi Internasional	26
1. Definisi Organisasi Internasional	27
2. Fungsi Organisasi Internasional	28
3. Klasifikasi Organisasi Internasional	29
C. Human Security	32
BAB III. ASEAN HUMAN ASSISTANCE (AHA CENTRE), BENCANA ALAM DI ASIA TENGGARA	36
A. ASEAN Human Assistance	36
1. Sejarah Pendirian, Tujuan dan Fungsi Utama	37
2. Perangkat Operasional Bantuan Bencana dan Tanggap Darurat	

.....	42
B. Bencana Alam di Asia Tenggara	45
1. Bentuk Penanganan Bencana Alam AHA Centre	50
BAB IV. PELUANG DAN TANTANGAN SERTA STRATEGI AHA CENTRE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI ASIA TENGGARA	63
A. Peluang AHA Centre Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Asia Tenggara	63
B. Tantangan AHA Centre Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Asia Tenggara	78
C. Strategi AHA Centre Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Asia Tenggara	81
BAB V. PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi AHA Centre	37
Gambar 2 Model Perjalanan Gelombang Tsunami Aceh Desember 2004	47
Gambar 3 Topan Nargis Dengan kecepatan Angin 130 mph dan Pusat Putaran Berkecepatan 160 mph	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, badai topan, letusan gunung berapi dan yang lainnya, sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Semua bencana alam sudah pasti akan mengakibatkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan serta populasi manusia. Secara singkat bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh kerusakan alam dan terjadi secara tiba-tiba.¹ Istilah bencana “alam” digunakan untuk mengurangi kesan besarnya konsekuensi kerusakan tersebut, walaupun terdapat hubungan langsung antara individu dan masyarakat dengan ancaman-ancaman yang disebabkan oleh kerusakan alam. Besarnya konsekuensi tersebut kemudian ditentukan ada atau tiadanyatindakan-tindakan manusia untuk menanggapi. Setiap peristiwa tersebut sulit untuk diprediksi kedatangannya, kecuali dalam setiap negara melakukan suatu kerjasama dalam hal teknologi, SDM, serta kerjasama yang dapat memfasilitasi semua komponen-komponen untuk mengatasi ancaman-ancaman bencana alam.

ASEAN merupakan salah satu kawasan yang tingkat ancaman akan bencana alam relatif tinggi. Asia Tenggara yang memiliki banyak gunung berapi, seolah menjadi langganan gempa. Untuk itu, waspada saja

¹ Nur Rachmat Yuliantoro. 2011. *Panduan Operasional IASC Tentang Perlindungan Orang-orang Dalam Situasi Bencana Alam*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada

tidak cukup, melainkan antisipasi. Mengingat hal tersebut, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah dengan meningkatkan kerjasama ASEAN dalam bidang penanggulangan bencana alam.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ASEAN memerlukan sebuah piagam (*charter*) agar dapat menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang mampu mewujudkan cita-cita yang bersifat *long-term visionary*, mampu menjawab tantangan di masa depan, filosofis tetapi praktis, dan mampu menerjemahkan "vision" menjadi "mission".² Proses pencapaian tersebut akan sangat sulit dan berjalan lambat apabila ASEAN tidak memiliki sebuah *charter*. Kini semakin dirasakan urgensinya bagi ASEAN untuk segera memiliki *charter* dan membentuk sebuah kerjasama.

Mengingat kembali bahwa, tujuan ASEAN yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967, yakni meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, teknik, ilmu pengetahuan, administrasi, dan sosial.³ Ini merupakan sebuah landasan ASEAN dalam usahanya untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang timbul dalam hal bencana alam demi menjaga kestabilan setiap negara di Kawasan Asia Tenggara.

Tekad ASEAN dalam penanganan bencana mulai muncul pasca terjadinya tsunami di Indonesia pada tahun 2004. Dengan melihat masalah tersebut, penanganan bencana ini tidak dapat lagi hanya dilakukan di tingkat

² Dian Triansyah Djani. 2007. *ASEAN Menatap Masa Depan "40 Tahun ASEAN"*. Jakarta : Departemen Luar Negeri R.I. Hal 3

³ Ade Maman Suherman. 2003. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal 146

sektoral tetapi harus melibatkan seluruh sektor yang terkait, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga *regional*, bahkan kerjasama internasional, bila diperlukan. Mengingat Indonesia dipenuhi oleh ancaman bencana alam dan demi menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyatnya maka pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan khusus para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 6 Januari 2005 yang membahas tentang penanggulangan dan solusi menghadapi gempa dan tsunami.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tsunami yang dilaksanakan di Jakarta tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi Jakarta, yang memuat program aksi untuk memperkuat kerjasama penanganan bencana, mulai dari sistem peringatan dini, penanganan pada periode tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengurangan resiko bencana. Pada pertemuan ini menghasilkan *ASEAN Agreement on Disaster Management And Emergency Response* (AADMER) sebuah kerjasama yang ditandatangani oleh para menteri luar negeri negara anggota ASEAN pada bulan Juni 2005 dan kemudian diberlakukan pada tanggal 24 Desember 2009. Deklarasi ini menghasilkan rumusan kerangka kerja untuk merealisasikan program dalam kaitan kerja sama dalam hal penanggulangan bencana. AADMER merupakan perjanjian pembentukan kerangka kerja penanganan tanggap darurat kawasan, yang mencakup identifikasi resiko bencana, pemantauan dan peringatan dini, pencegahan dan mitigasi, kesiapan dan respon, rehabilitasi, penelitian kerjasama teknis serta penelitian ilmiah

dan AHA Centre.⁴ Ini merupakan suatu komitmen ASEAN dalam mengurangi kerugian dan meningkatkan tanggap darurat bersama untuk bencana di kawasan ASEAN.

Salah satu komponen penting dalam perjanjian AADMER adalah pembentukan *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management/ASEAN Human Assistance (AHA Centre)*. AHA Centre merupakan pusat koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan bagi penanganan bencana. AHA Centre didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi diantara negara-negara anggota ASEAN, PBB dan berbagai organisasi internasional dalam mempromosikan kolaborasi regional dalam penanganan bencana.⁵ AADMER menetapkan bahwa AHA Centre harus dibentuk untuk menjalankan fungsi AADMER. Dengan kata lain AHA Centre merupakan fungsi operasional dari AADMER untuk menerjemahkannya menjadi tindakan nyata dan berdampak mendasar pada semua aspek AADMER sebagai bagian dari komitmen ASEAN untuk memiliki komunitas yang tahan terhadap bencana tahun 2015.

KTT ASEAN ke-19 tanggal 17 November 2011 di Bali, para Menlu ASEAN, menandatangani persetujuan pembentukan AHA Centre di Jakarta yang bertempat di gedung BPPT (Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi).⁶ Setelah persetujuan pembentukan AHA Centre, sejumlah mitra dialog ASEAN, khususnya Australia, Jepang, Selandia Baru, Amerika Serikat

⁴ <http://ppr.asean.org/wp-content/uploads/2012/02/AADMER-and-AHA-for-PPR-27-28-Feb-2012-Spore.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2012

⁵ http://www.bnpb.go.id/website/asp/berita_list.asp?id=346. Diakses pada tanggal 24 Mei 2012

⁶ <http://www.aseansec.org/26735.htm>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2012

dan Uni Eropa, juga telah membantu pembentukan AHA Centre. Dengan kata lain promosi dari AHA Centre berhasil menarik beberapa negara serta organisasi internasional untuk turut ikut memberikan dukungan dalam pembentukan AHA Centre sehingga memberikan kekuatan baru untuk memaksimalkan kinerja dari AHA Centre itu sendiri.

Dengan semua bantuan yang didapatkan dari kerjasama regional, ini dapat meningkatkan kemampuan kompetensi inti AHA Centre untuk penanggulangan bencana di Kawasan Asia Tenggara yang rentan terjadinya bencana alam. Kompetensi inti AHA Centre sebagai fungsi koordinasi, mobilisasi sumber daya, dan manajemen pengetahuan. Semua itu tentu harus ditunjang oleh aplikasi teknologi untuk meningkatkan kompetensi inti. Tujuan akhirnya adalah fungsi kreasi nilai sebagai kompetensi inti AHA Centre dan memperkuat AHA Centre.

Ada beberapa faktor tertentu selain faktor alam itu sendiri. kurangnya koordinasi dalam bentuk peringatan dini dan respon siaga bencana antar negara di Kawasan Asia Tenggara serta instansi-instansi pemerintah disetiap negara yang berhubungan dengan kebencanaan yang kurang dalam memberikan peringatan dini sehingga mengakibatkan banyaknya kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah maupun masyarakat yang terkena bencana. Beberapa faktor inilah yang melatarbelakangi tingginya tingkat kerugian akibat bencana alam yang tidak diantisipasi secara tepat.

Perkembangan terakhir ini semakin mengukuhkan posisi ASEAN di dunia internasional dalam hal kerjasama regional untuk mengatasi masalah

penanggulangan bencana. Di samping itu, dukungan dari berbagai negara dan organisasi internasional terhadap upaya ASEAN juga dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penanggulangan bencana secara dini memang sangat dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dalam menerapkan berbagai sistem respon siaga bencana, bantuan dan koordinasi terhadap seluruh elemen dalam negeri di Kawasan Asia Tenggara. Serta dibutuhkan juga kerjasama ASEAN dalam hal ini AHA Centre (*ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management/ASEAN Human Assistance*) sebagai perwujudan negara-negara ASEAN dalam masalah penanggulangan bencana alam. Dengan berbagai fakta yang terjadi di lapangan, AHA Center telah menunjukkan kinerja yang maksimal dalam menghadapi situasi darurat. Namun, untuk kedepannya, AHA Center masih memiliki banyak tantangan dan juga banyak peluang untuk mencapai tujuan dari komunitas ASEAN tahan bencana pada tahun 2015. Karena itulah penulis tertarik mengangkat judul “ *Prospek Kerjasama AHA Centre Dalam Bidang Penanggulangan Bencana Di Asia Tenggara*”

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

ASEAN Human Assistance (AHA Center) sebagai suatu organisasi yang diharapkan mampu melaksanakan tujuan dan fungsinya dengan baik untuk mengawasi dan menginformasikan atau mengkoordinasikan aktifitas kebencanaan di Asia Tenggara. Namun, perjalanan AHA Center baru saja dimulai. Sebagai lembaga atau organisasi yang baru terbentuk ini tentu masih

memiliki banyak kekurangan. Tentu saja yang paling utama yakni teknologi. Tidak hanya teknologi, tapi juga perlunya sumber daya manusia yang diharapkan lebih profesional dalam mengoperasikan sistem logistik yang dibentuk oleh ASEAN tersebut.

Dalam perkembangan AHA Center ini, dengan melihat lembaga atau organisasi tersebut baru saja berdiri pada tahun 2011 kemarin, sekilas terlihat menimbulkan banyak keraguan di kalangan masyarakat. Apalagi ASEAN dikenal sebagai organisasi regional yang memiliki banyak kerjasama yang tidak berjalan secara optimal sehingga menimbulkan kritikan-kritakan yang cukup banyak dari masyarakat internasional. Hal inilah yang dapat mempengaruhi naik turunnya perkembangan AHA Center untuk kedepannya. Diharapkan hal tersebut tidak menjadi sebuah masalah lain dalam organisasi tersebut dan tetap fokus pada pengembangan pengawasan, tanggap darurat, serta koordinasi aktifitas kebencanaan di Asia Tenggara untuk kedepannya.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis merumuskan dan membatasi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peluang kerjasama AHA Centre dalam penanggulangan bencana alam di Asia Tenggara?
2. Bagaimanakah tantangan kerjasama AHA Center dalam penanggulangan bencana alam di Asia Tenggara?
3. Bagaimanakah strategi AHA Center dalam penanggulangan bencana alam di Asia Tenggara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan peluang AHA Centre dalam penanggulangan bencana alam di kawasan Asia Tenggara.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tantangan AHA Center dalam penanggulangan bencana alam di kawasan Asia Tenggara
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi AHA Center dalam penanggulangan bencana alam di kawasan Asia Tenggara

2. Manfaat Peneliti

Apabila penelitian tersebut tercapai maka penelitian ini :

- a. Diharapkan menjadi sumber informatif dalam rangka pengkajian lebih lanjut maupun pengembangan ilmu pengetahuan pada masa akan datang bagi penstudi ilmu hubungan internasional dan pemerhati internasional khususnya kerjasama ASEAN dalam bidang penanggulangan bencana alam.
- b. Diharapkan sebagai bahan informasi bagi pembuat kebijakan, terutama pemerintah Indonesia mengenai usaha-usaha penanggulangan bencana oleh AHA Centre di kawasan Asia Tenggara.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil dan analisa dari latar belakang dan mengetahui masalah yang ada, maka diperlukan kerangka konseptual yang digunakan untuk membantu proses penjelasan penelitian ini. Untuk membantu penjelasan penelitian ini, penulis memakai konsep organisasi fungsional regional dan konsep human security.

1. Association South Asia Nation (ASEAN)

ASEAN dibentuk tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Philipina, dan Malaysia berkumpul di Bangkok menorehkan sejarah di regional Asia Tenggara dalam membangun suatu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Salah satu butir tujuan deklarasi tersebut di tegaskan, Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.⁷

kerjasama dalam penanganan bencana alam dalam kerangka ASEAN sudah terbangun lebih dari tigapuluh tahun lamanya. Deklarasi Bangkok 1967 yang menandai berdirinya ASEAN merupakan landasan bagi negara anggotanya untuk saling memperkuat kerjasama regional guna meningkatkan kedamaian, stabilitas, kemajuan regional serta untuk saling memupuk persaudaraan dan solidaritas terutama di saat salah satu anggotanya tertimpa bencana. komitmen negara-negara anggota yang untuk saling membantu pada

⁷ Ade Maman Suherman. Op. Cit. Hal 142

saat terjadi bencana antara lain dimuat dalam *Declaration of ASEAN Concord* yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1976. Deklarasi tersebut menyebutkan bahwa “*natural disaster and othe major calamities can retard teh pace of development of member states, therefore they shall extend, within their capabilities, assistance for relief of member states in distrees*”⁸.

Pertemuan Khusus Para Pemimpin ASEAN Paska Gempa Bumi dan Tsunami (KTT Tsunami) di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. KTT Tsunami antara lain telah menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi Jakarta, yaitu “Deklarasi tentang Aksi untuk Memperkuat Bantuan Darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Pencegahan atas Dampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami” (Deklarasi Jakarta).⁹

Adapun beberapa butir penting lain yang dicakup dalam Deklarasi Jakarta yang terkait dengan program ASEAN adalah:

1. Pemanfaatan aset sipil dan militer dalam operasi bantuan bencana.
2. Pembentukan pusat bantuan kemanusiaan ASEAN (*ASEAN Humanitarian Assistance/AHA Centre*)
3. Pembentukan Jaringan Pemakaian Bersama Informasi dan Komunikasi ASEAN untuk bencana.¹⁰

⁸ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN.2007. *ASEAN Selayang Pandang*. Direktorat Jenderal Kerjasama. Jakarta. Hal 95

⁹ Ibid. Hal 96

¹⁰ Ibid. Hal 96-97

2. Organisasi Fungsional

Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu yang mengkaji tentang sifat dan konsekuensi dari hubungan antar sistem negara yang berinteraksi satu sama lain dengan kepentingan masing-masing¹¹. Sistem negara yang dimaksudkan disini merupakan sebuah institusi historis yang dibentuk oleh masyarakat dan pada hakikinya merupakan sebuah organisasi sosial dalam hubungan internasional¹². Seiring dengan perkembangan zaman, sistem internasional pun berkembang dan kini sudah semakin mengglobal. Kini, dalam interaksi-interaksi internasional, tidak hanya negara saja yang melakukannya, ada banyak lagi aktor-aktor lain yang melakukan karena didukung oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Dalam istilah Hubungan Internasional, dikenal ada dua jenis aktor, yaitu aktor negara (*state actor*) dan aktor non-negara (*non-state actor*)¹³.

Organisasi internasional merupakan,

Suatu pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda¹⁴.

¹¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal. 2

¹² Ibid. Hal. 12

¹³ Teuku May Rudy. 2005. *Administrasi & Organisasi Internasional*. Refika Aditama: Bandung. Hal. 23

¹⁴ Ibid. Hal. 3

Organisasi internasional adalah subjek hukum internasional bukan negara. Khususnya, karena organisasi internasional pada umumnya merupakan gabungan keanggotaan masyarakat internasional.

Karena memiliki keanggotaan terbuka yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat internasional, maka sangat penting untuk memperhatikan bagaimana kedudukan kedaulatan jika dipandang dengan kaca mata organisasi internasional. Satu hal yang perlu diingat, yakni organisasi internasional tidak memiliki kedaulatan supranasional atau dengan kata lain organisasi internasional meskipun berada dalam ruang lingkup internasional, tapi negara tetap memiliki kedaulatan yang tidak bisa diganggu gugat.

Ada pula organisasi internasional yang terbentuk dari kedekatan geografis, dalam hal ini ASEAN yang meliputi kawasan Asia Tenggara. Ini merupakan salah satu organisasi regional yang telah melakukan berbagai macam kerjasama internasional dengan tujuan yang sama serta meningkatkan derajat organisasi di panggung internasional. Kerjasama yang dibentuk misalnya, membentuk lembaga atau organisasi fungsional yang hanya sebatas regional untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam kawasan tersebut.

Selain itu, Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. Menyatakan bahwa,

Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually

*advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities*¹⁵.

Secara sederhana, definisi organisasi internasional di atas mengandung tiga unsur penting, yaitu adanya keterlibatan negara dalam suatu pola kerja sama, adanya pertemuan-pertemuan secara berkala, dan adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional” (*international civil servant*).

Organisasi internasional dibentuk sesuai dengan kebutuhan negara-negara anggotanya dan tujuan yang ingin dicapai. Para ahli kemudian mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan struktur, aspek geografis, tujuan maupun fungsi dari organisasi tersebut. Salah satunya ialah Henry G. Schermers. Ia mengklasifikasikan organisasi internasional ke dalam empat bagian, yaitu :

1. *Public Organizations vs Privat Organizations,*
2. *Universal Organizations vs Closed Organizations,*
3. *Supranational Organizations vs Intergovernmental Organizations,*
4. *General organizations vs functional organizations.*¹⁶

¹⁵ Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. 1966. *Organizing for Peace: International Organization in World Affairs*. Houghton Mifflin Co.: Boston, New York

¹⁶ Ibid. Hal. 54

I Wayan Pathiana telah melakukan pengklasifikasian terhadap organisasi internasional dalam berbagai segi, yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari ruang lingkup kegiatannya dibedakan antara organisasi internasional global/umum dan organisasi internasional khusus.
2. Ditinjau dari tujuannya, dibedakan antara organisasi internasional dengan tujuan umum dan organisasi internasional dengan tujuan khusus/terbatas.
3. Ditinjau dari sudut keanggotaannya, dibedakan antara organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri atas negara-negara atau pemerintah negara-negara (*intergovernment organization*) dan organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri atas bukan pemerintah negara-negara (*non government organization*)¹⁷

Berdasarkan beberapa pengklasifikasian serta definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa ASEAN Human Assistance Coordination dapat diklasifikasikan sebagai *functional organization* atau organisasi fungsional yang merupakan organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat terbatas. Organisasi tersebut diabdikan kepada suatu fungsi yang spesifik yang menitik beratkan pada suatu permasalahan baik itu pada bidang ekonomi, keamanan, dan sosial-budaya dalam suatu kawasan.¹⁸ Untuk masalah penanganan bencana alam di Asia Tenggara, dengan melihat fungsi dan tujuannya dalam

¹⁷ Ade Maman Suherman. Op. Cit. Hal 60

¹⁸ Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe. 1990. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, Bandung : Abardin. Hal. 316.

penyelesaian masalah tersebut, AHA Centre dengan berbagai komponen strategi yang digunakan untuk permasalahan kebencanaan akan menunjukkan peningkatan organisasi tersebut, serta meningkatkan komunitas ASEAN yang tahan terhadap bencana tahun 2015.

2. Human Security

konsep *Human Security* tidak lagi berfokus kepada keamanan negara yang murni masalah militer tetapi menitik beratkan pada keamanan individu yang mencakup masalah ekonomi, demokrasi, perlindungan terhadap lingkungan, serta penghormatan terhadap masalah Hak Asasi Manusia. Dapat ditekankan bahwa isu *human security* telah meliputi berbagai aspek kehidupan manusia.

Human security merupakan konstruksi pemikiran mengenai keamanan negara menuju kepada ide keamanan manusia termasuk didalamnya keamanan individu dan masyarakat, termasuk anak-anak, warga sipil di wilayah perang, minoritas etnis dan lain sebagainya dari berbagai jenis kekerasan maupun kerusakan akibat bencana alam.

Konsep *human security* diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) dalam Human Development report 1994. Laporan UNDP menekankan bahwa *human security* adalah sesuatu yang universal, relevan dengan semua manusia di mana pun. Karena ancaman *human security* bersifat umum, tidak memandang batas negara. Konsep

human security memusatkan perhatiannya kepada manusia (people-centered) bukan pada negara (state-centered).¹⁹

UNDP berpendapat bahwa,

*Human security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life, whether in homes, in job or in communities.*²⁰

Untuk mendukung adanya *human security*, maka dibutuhkan peran pemerintah setempat maupun organisasi internasional, yang bukan saja memberikan bantuan yang sifatnya sementara dan memberikan efek ketergantungan, namun juga harus memberikan bantuan yang dapat membuat individu menjadi mandiri. ASEAN sendiri belum sepenuhnya menerapkan konsep Human Security, namun terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang menerapkan Human Security ke dalam konstitusinya. Konsep Human Security di sini menjadi kerangka yang dapat menganalisis prospek AHA Centre.

¹⁹ <http://id.scribd.com/doc/51882487/Human-Security>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2013

²⁰ http://propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human_security_dan_ham_jk.pdf. Diakses pada tanggal januari 2013

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif untuk menjelaskan fakta dari fenomena yang terjadi serta dengan menggunakan teori untuk dapat menganalisa fenomena yang ada.²¹ Dari pendekatan yang digunakan, penulis akan menjabarkan serta melakukan analisis yang bersifat deskriptif. Dengan demikian, diharapkan dapat menjelaskan peran AHA Centre dalam menanggulangi bencana alam di Asia Tenggara.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari berbagai literatur yang terkait. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam skripsi ini adalah :

- a. Perkembangangan AHA Centre di Asia Tenggara dalam mengatasi bencana alam.
- b. Kebijakan yang diambil AHA Centre (*ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management/ASEAN Human Assistance*) dalam mengatasi bencana alam di Asia Tenggara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

²¹ Mochtar Mas'ood. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta : LP3ES. Hal. 13.

dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Tempat penelitian yang akan penulis kunjungi yaitu :

- a. Perpustakaan Universitas Hasanuddin di Makassar
- b. Perpustakaan FISIP UNHAS di Makassar
- c. Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan, di Makassar
- d. Perpustakaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin Makassar.

4. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif digunakan untuk memperkuat analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Association South Asia Nation (ASEAN)

Interaksi antarnegara semakin berkembang dengan timbulnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda yang dimiliki masing-masing negara. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antarnegara maupun kelompok dalam dunia internasional. Hal ini pula yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antarnegara dalam berbagai bidang. Misalnya *Association South Asia Nation (ASEAN)* yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region.

ASEAN dibentuk tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Philipina, dan Malaysia berkumpul di Bangkok menorehkan sejarah di regional Asia Tenggara dalam membangun suatu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Salah satu butir tujuan deklarasi tersebut di tegaskan :

“Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi”²²

Untuk menjalankan visinya, tentu ASEAN perlu belajar banyak dari organisasi Supranasional misalnya Uni Eropa yang terbentuk sepuluh tahun sebelum terbentuknya ASEAN dapat dikatakan organisasi tersebut telah mengalami kemajuan yang telah dicapai dengan masyarakat Eropa yang telah terintegrasi menjadi suatu kekuatan politik dan ekonomi dunia.

Selama empat dekade keberadaannya, ASEAN telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan positif dan signifikan yang mengarah pada pendewasaan ASEAN. Terlihat dari visi ASEAN 2020, ASEAN menegaskan visinya dalam suatu kalimat yang tersusun baik, nyaman di telinga, tenteram di perasaan, tetapi sekaligus merupakan utopia yang selalu menjadi patamorgana yang hanya ada dalam dunia imajiner. Visi tersebut adalah “terwujudnya ASEAN sebagai wadah kerja sama bangsa-bangsa Asia Tenggara, yang hidup dalam perdamaian dan kemakmuran, menyatu dalam kemitraan yang dinamis dan komunitas yang saling peduli serta terintegrasi dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia”²³

Ada pula maksud dan tujuan ASEAN yang dapat ditelusuri dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang meliputi:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini.

²² Ade Maman Suherman. Op. Cit. Hal 142

²³ Ibid. Hal 143

2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara- negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang.
5. Meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-saran pengangkutan dan komunikasi serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka.
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.
7. Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional.²⁴

Negara-negara ASEAN menyadari perlunya meningkatkan kekompakan, kohesivitas dan efektifitas kerjasama. Selama empat dekade, kerjasama ASEAN telah menjalani tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan kedepan dengan dibentuknya Komunitas ASEAN atau *ASEAN Community* . Hal ini diperkuat dengan disahkannya Piagam ASEAN (ASEAN

²⁴ Ibid. Hal 146-147

Charter) yang secara khusus menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN. Pembentukan Komunitas ASEAN tersebut diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya *ASEAN Vision 2020* di Kuala Lumpur pada tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu satuan komunitas yang berpandangan maju ke depan, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Tekad untuk membuat komunitas ASEAN kemudian di pertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya *ASEAN Concord II*. *ASEAN Concord II* menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020. Komitmen untuk mewujudkan komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*” pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu Filipina pada Januari 2007. Tujuan dari pembentukan Komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal.²⁵

²⁵ Direktorat Jenderal Ketjasama ASEAN. Op. Cit. Hal 28

Sejak tahun 1967, selain perlunya stabilitas politik, para pendiri ASEAN juga menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Dalam penekanannya disebutkan dalam tujuan utama untuk kerjasama secara lebih efektif dalam memanfaatkan pertanian dan industri, perluasan perdagangan, termasuk dalam menghadapi masalah-masalah komoditi internasional, peningkatan sarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.²⁶ Namun mengingat upaya dalam meningkatkan kekompakan, kohesivitas dan efektifitas kerjasama, ASEAN tidak lagi hanya berfokus pada kerjasama-kerjasama ekonomi namun juga harus didukung oleh kerjasama lainnya di bidang keamanan dan sosial budaya. Dalam menjaga keseimbangan kerjasama tersebut, pembentukan komunitas ASEAN 2015 didasari atas 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*).²⁷

Di dalam Komunitas Sosial Budaya ASEAN, kerjasama tersebut mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi, dan kepegawaian publik, serta Yayasan ASEAN.²⁸

²⁶ Ade Maman Suherman. Op.Cit. Hal 147

²⁷ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Op. Cit. Hal 28

²⁸ Ibid. Hal 81

kerjasama dalam penanganan bencana alam dalam kerangka ASEAN sudah terbangun lebih dari tigapuluh tahun lamanya. Deklarasi Bangkok 1967 yang menandai berdirinya ASEAN merupakan landasan bagi negara anggotanya untuk saling memperkuat kerjasama regional guna meningkatkan kedamaian, stabilitas, kemajuan regional serta untuk saling memupuk persaudaraan dan solidaritas terutama di saat salah satu anggotanya tertimpa bencana. komitmen negara-negara anggota yang untuk saling membantu pada saat terjadi bencana antara lain dimuat dalam *Declaration of ASEAN Concord* yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1976. Deklarasi tersebut menyebutkan bahwa “*natural disaster and othe major calamities can retard teh pace of development of member states, therefore they shall extend, within their capabilities, assistance for relief of member states in distrees*”²⁹.

Tahun 2003, Komite ASEAN untuk Penanganan Bencana (ASEAN *Committee on Disaster Management/ACDM*) secara resmi dibentuk dengan mandat mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatan yang kemudian dikenal sebagai Program Regional ASEAN untuk Penanganan Bencana (ASEAN *Regional Programme on Disaster Management/ARPDM*). ARPDM memuat kerangka kerjasama antar negara ASEAN dan juga dengan Mitra Wicara dan organisasi internasional untuk periode 2004 – 2011. Rangkaian program terpadu ARPDM, mencakup lima komponen inti dan mencakup lebih dari 29 kelompok kegiatan. Kelima komponen inti dimaksud adalah:

²⁹ Ibid. Hal 95

1. Pembentukan Kerangka Penanganan Bencana Regional ASEAN
2. Peningkatan Kapasitas
3. Pertukaran Informasi dan Sumber Daya
4. Peningkatan Kolaborasi dan Penguatan Kemitraan
5. Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran dan Advokasi Publik.³⁰

Kejadian tsunami telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menata kembali dan memperkuat kerjasamanya di bidang penanganan bencana. Masalah penanganan bencana, tidak dapat lagi hanya dilakukan di tingkat sektoral tetapi harus melibatkan seluruh sektor terkait, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga regional, bahkan melalui kerjasama internasional, bila memang diperlukan. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Pertemuan Khusus Para Pemimpin ASEAN Paska Gempa Bumi dan Tsunami (KTT Tsunami) di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. KTT Tsunami antara lain telah menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi Jakarta, yaitu “Deklarasi tentang Aksi untuk Memperkuat Bantuan Darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Pencegahan atas Dampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami” (Deklarasi Jakarta).³¹

Adapun beberapa butir penting lain yang dicakup dalam Deklarasi Jakarta yang terkait dengan program ASEAN adalah:

1. Pemanfaatan aset sipil dan militer dalam operasi bantuan bencana.

³⁰ Ibid. Hal 95

³¹ Ibid. Hal 96

2. Pembentukan pusat bantuan kemanusiaan ASEAN (*ASEAN Humanitarian Assistance/AHA Centre*)
3. Pembentukan Jaringan Pemakaian Bersama Informasi dan Komunikasi ASEAN untuk bencana.³²

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam KTT Tsunami di Jakarta, pada bulan Juni 2005, ASEAN berhasil menyelesaikan Persetujuan Penanganan Bencana dan Tanggap Darurat (*ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response/AADMER*). Persetujuan dimaksud kemudian ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada kesempatan Pertemuan ke-38 Para Menteri Luar Negeri ASEAN di Vientiane, Laos, tanggal 26 Juli 2005. AADMER bersifat terpadu, komprehensif dan menyeluruh karena mencakup semua aspek dan siklus penanganan bencana sebagai berikut:

- a. Identifikasi resiko bencana, penilaian dan pemantauan
- b. Pencegahan dan mitigasi
- c. Peringatan dini
- d. Kesiapsiagaan
- e. Tanggap darurat
- f. Rehabilitasi

Berdasarkan hasil dari upaya penguatan kerjasama regional yang dilakukan ASEAN dalam menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sehingga dapat disimpulkan bahwa, terbukti adanya keseriusan dalam meningkatkan

³² Ibid. Hal 96-97

atau memajukan salah satu komunitas ASEAN dalam bidang sosial budaya 2015.

AHA Centre yang merupakan hasil dari sebuah kesepakatan telah menjadi sebuah organisasi yang bersifat regional dalam mengatasi bencana alam yang terbentuk dari keinginan atau komitmen para pemimpin ASEAN yang menjadikan bencana alam sebagai isu penting dalam meningkatkan kedamaian, stabilitas, kemajuan regional serta untuk saling memupuk persaudaraan dan solidaritas dalam setiap negara anggota yang terlanda bencana alam.

B. Organisasi Internasional

Kerjasama-kerjasama yang terwujud dalam suatu organisasi telah terbentuk dalam lingkup regional sebelum abad ke-20. Organisasi internasional kemudian mulai berkembang pada abad ke-20, yang dirintis sejak masa berlangsungnya The Hague Conference I (1899) dan II (1907). Organisasi internasional terus berkembang hingga terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945.³³ Hal ini didukung pula oleh semakin berkembangnya kebutuhan yang dimiliki setiap negara hingga memerlukan interaksi atau kerjasama yang baik dengan negara lainnya. Untuk memahami lebih lanjut, berikut akan dibahas mengenai definisi, fungsi, serta klasifikasi organisasi internasional.

³³ Teuku May Rudy. Op.Cit. Hal. 15.

1. Definisi Organisasi Internasional

Menurut NA Maryan Green, organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih negara-negara yang menjadi peserta.³⁴ Selain itu L.Leonard dalam *International Organization* juga mengemukakan bahwa “*Sovereign states recognized the need for more sustained methods of collaboration on numerous problems. State established international organization to meet these specific needs*”. Negara-negara menyadari perlunya pengembangan metode kerjasama berkesinambungan yang lebih baik mengenai penanggulangan berbagai masalah sehingga perlu dibentuk organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.³⁵

Selain itu David S. Cheever & H. Field Haviland Jr. Juga mengatakan, Organisasi Internasional didefinisikan sebagai “*Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities*”. Suatu kerjasama yang melembaga antarnegara dengan persetujuan dasar yang dapat memberikan manfaat timbal-balik yang diwujudkan melalui pertemuan dan kegiatan yang dilakukan secara berkala. Dari definisi tersebut, tergambar bahwa organisasi internasional sebagai bentuk kerjasama memiliki ruang lingkup yang melintasi batas negara dengan tujuan-tujuan yang disepakati

³⁴ Ade Maman Suherman. Op. Cit. Hal 50

³⁵ Teuku May Rudy. Op.Cit. Hal. 4.

bersama, dan negara maupun kelompok dapat menjadi aktor dalam interaksi tersebut.³⁶

Berbeda dengan beberapa pendapat yang telah disebutkan, Henry G. Schermers mengungkapkan hal lain mengenai definisi organisasi internasional. Ia menyatakan :

*there is no universally accepted definition of an international organization. And the possibility of making such a definition depends on the context concerned. Most studies of international organization are limited to international governmental organizations, but even after such limitation, definitions vary.*³⁷

Dari pernyataan tersebut, Henry G. Schermers mengungkapkan bahwa tidak ada definisi organisasi internasional yang diterima secara umum. Definisi tersebut bergantung kepada konteks yang digunakan oleh masing-masing pihak yang mencoba untuk mendefinisikannya. Pada umumnya, kajian mengenai organisasi internasional terbatas pada organisasi antarpemerintah. Meskipun demikian, organisasi internasional tetap memiliki beragam definisi.³⁸

2. Fungsi Organisasi Internasional

Penyelesaian masalah di antara negara-negara anggota maupun dunia internasional dilakukan melalui pelaksanaan peranan dan fungsi yang dimiliki oleh setiap organisasi internasional sesuai dengan perjanjian atau tujuan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut dilaksanakan tentunya dengan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

³⁶ Ibid. Hal. 2 – 3

³⁷ Ade Maman Suherman. Op.Cit. Hal. 46

³⁸ Ibid. Hal. 47

sesuai dengan bidang masing-masing. Secara umum, fungsi organisasi internasional, yaitu :

- a. Tempat berhimpun bagi negara-negara anggota baik organisasi internasional antarnegara atau pemerintah maupun bagi organisasi internasional non-pemerintah seperti kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.
- b. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional.
- c. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rezim-rezim internasional.
- d. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota (bisa dengan negara lain yang bukan anggota dan bisa dengan organisasi internasional lainnya).
- e. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.³⁹

³⁹ Ibid. Hal. 27

3. Klasifikasi Organisasi Internasional

Organisasi internasional diklasifikasikan sesuai dengan sudut pandang atau konteks yang digunakan. Schermers mengklasifikasikan organisasi internasional menjadi empat bagian dengan melihat ruang lingkup, pelaku, dan tujuan organisasi tersebut, yaitu :

a. Organisasi internasional publik dan privat

Organisasi internasional publik adalah sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan perjanjian antarnegara dengan tiga syarat pendirian, yaitu harus didirikan berdasarkan perjanjian internasional, harus memiliki organ, dan didirikan berdasarkan hukum internasional. Organisasi privat internasional didirikan berdasarkan hukum internasional privat bukan hukum internasional publik yang dalam hal ini sudah masuk ke dalam yurisdiksi hukum nasional yang membidangi masalah privat dan tunduk pada hukum nasional suatu negara.

b. Organisasi yang berkarakter universal dan tertutup

Organisasi universal memiliki karakteristik yaitu memiliki ruang lingkup global, kebutuhan yang harus dipenuhi dalam level internasional, dan dibangun atas dasar perbedaan pandangan politik, budaya, serta perbedaan tahap kemajuan. Organisasi internasional tertutup dilihat dari keanggotaannya, organisasi ini tidak akan menerima keanggotaan selain dari komunitasnya.

c. Organisasi antarpemerintah dan supranasional

Organisasi antarpemerintah hanya terbatas pada organ eksekutif dari suatu pemerintahan, yang diterapkan melalui kerjasama antarpemerintah maupun organ-organ pemerintah selain organisasi supranasional. Organisasi supranasional ialah organisasi kerjasama dalam berbagai bidang, dari legislasi, yudikasi, eksekutif hingga warga negara.

d. Organisasi umum dan fungsional.

Organisasi umum sering juga disebut dengan organisasi politik. Organisasi fungsional ialah organisasi yang memiliki kekhususan dalam bidang fungsi spesifik dari suatu organisasi.⁴⁰

Beberapa ahli lain juga mengklasifikasikan organisasi internasional. Salah satunya ialah A. Lorey Bennett. Menurut A. Lorey Bennett, "*Modern international organizations may be classified as intergovernmental organizations (IGO's) and non governmental organizations (NGO's)*". Sama dengan Schermers, beliau juga mengklasifikasikan organisasi internasional antara privat dan publik, universal dan regional, tujuan umum dan tujuan khusus.⁴¹

Berdasarkan definisi-definisi dan klasifikasi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional adalah suatu bentuk kerjasama antarnegara yang memiliki tujuan-tujuan tertentu yang telah disepakati bersama dalam menangani masalah yang timbul di dalam negara, maupun dalam suatu kawasan. Dalam kerjasama yang berlangsung, aktor

⁴⁰ Ibid. Hal. 54 – 57

⁴¹ Ibid. Hal. 57

dalam pelaksanaan hubungan internasional yang tercipta tidak hanya negara, tetapi juga suatu kelompok atau *non-state actors*.

Permasalahan kebencanaan yang melanda kawasan Asia Tenggara, ASEAN dengan kerjasama-kerjasama yang dibentuk untuk memajukan salah satu komunitas telah menjadi sorotan dalam mengatasi permasalahan tersebut, dengan melihat fungsi salah satu organisasi yang merupakan hasil kerjasama ASEAN yakni AHA Centre. Organisasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam suatu organisasi fungsional dikarenakan memiliki fungsi spesifik yang terpusat pada penanganan masalah bantuan kemanusiaan dalam hal bencana alam. Pelaksanaan fungsi IMF dan tercapainya tujuan-tujuan yang telah tercantum dalam *Article of Agreement*-nya merupakan hal penting yang dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan organisasi ini.

C. Human Security

Human security hadir dari sebuah pergeseran isu keamanan tradisional yang bersifat *power* yang didominasi oleh aspek militer. Pergeseran tersebut terlihat pada munculnya isu-isu atau ancaman yang baru dalam studi hubungan internasional. keamanan tradisional ke keamanana non tradisional. Keamana non tradisional lebih banyak membahas tentang bagaimana isu keamanan muncul dalam sebuah negara atau bangsa atau hubungan antar negara yang saat ini dihadapi oleh masyarakat dunia. Keamanan non tradisional ini seperti misalnya masalah lingkungan hidup, kemanusiaan,

perdagangan, bahkan juga demokrasi. Salah satu pengembangan dari isu keamanan non tradisional ini adalah isu *human security*.⁴²

Isu *Human Security* digambarkan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam *Human Development Report* (1994) telah menggambarkan *Human Security* sebagai :

*Human Security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs or in communities. Such threats can exist at all levels of national income and development.*⁴³

Human Security pada dasarnya ditujukan untuk mengembalikan permasalahan keamanan ini tidak lagi menjadi sebuah konsep yang dibentuk, disusun dan ditetapkan oleh negara sebagai sebuah institusi melainkan dikembalikan kepada hakekat manusia sebagai manusia sebenarnya yang membutuhkan rasa aman dari segala ancaman apapun baik dari institusi maupun alam.⁴⁴

Kanti Bajpal dalam bukunya *Human Security: Concept and Measurement* lebih lanjut mengatakan bahwa setiap orang di dunia pada dasarnya memiliki beragam tekanan dan masalah yang membutuhkan

⁴² Tonny Dian Effendi. *Non Tradisional Security Dalam Praktik Demokrasi di Indonesia*. Hal. 3

⁴³ Baylis, John, Steve Smith, Patricia Owens. 2008. *The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relation*. United States : Oxford Universtity Press.

⁴⁴ Op. Cit. Hal. 3

perhatian dan tindakan untuk mengatasinya yang kemudian mempengaruhi manusia dalam berbagai hal dalam hidupnya.⁴⁵

Dengan berakhirnya perang dingin, kebutuhan untuk pemikiran baru terhadap konsep keamanan berkembang dengan sangat cepat. Pada tahun 1991, salah satu *Non Government Organization* (NGO) Stockholm International Peace menunjukkan inisiatif pada keamanan global dan pemerintah ditunjukkan dengan menerbitkan *Common Responsibility in the 1990's* atau tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ini lebih menitik beratkan tantangan kedepan terhadap masalah keamanan dibandingkan masalah rivalitas politik dan persenjataan. Inisiatif Stockholm kemudian menggemakan ke seluruh dunia mengenai konsep keamanan yang harus diperluas dari yang tradisional yang hanya fokus terhadap keamanan negara untuk juga memberikan perhatian terhadap keamanan manusia dan keamanan terhadap bumi.⁴⁶

Hideaki Shinoda juga mengungkapkan terdapat hubungan antara proses demokratisasi dengan perkembangan *human security* sebagai bagian dari *non tradisional security*. Shinoda juga menyebutkan bahwa perkembangan konsep keamanan ini dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu demokratisasi, internasionalisasi, dan sosialisasi. Shinoda juga berpendapat

⁴⁵ Kanti Bajpal. 2000. *Human Security: Concept and Measurement*. New Delhi: Jawahral Nehru University. Hal 5

⁴⁶ The Commission on Global Governance. 1995. *Our Global Neighborhood*. New York: Oxford University Press. Hal 338

bahwa munculnya ide tentang tanggung jawab atas permasalahan politik, ekonomi dan sosial dalam masyarakat menjadi tanggung jawab bersama.⁴⁷

Human security menurut Shinoda berkaitan dengan dua aspek utama. Pertama, *human security* berkaitan dengan kebebasan atau keamanan terhadap ancaman kronik seperti kelaparan, penyakit dan penindasan. Yang kedua berkaitan dengan perlindungan terhadap penderitaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu *human security* berkaitan pula dengan tujuh kategori utama yaitu ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan keamanan politik.⁴⁸ Pendapat ini memuat pesan bahwa telah terjadi perkembangan dalam konsep keamanan dunia yang kemudian mengarah kepada perkembangan actor diluar negara dan juga pada aspek mana keamanan ini berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa konsep *Human Security* tidak lagi berfokus kepada keamanan negara yang murni masalah militer tetapi menitik beratkan pada keamanan individu yang mencakup masalah ekonomi, demokrasi, perlindungan terhadap lingkungan, serta penghormatan terhadap masalah Hak Asasi Manusia. Dapat ditekan bahwa isu *human security* telah meliputi berbagai aspek kehidupan manusia.

⁴⁷ Tonny Dian Effendi. Op. Cit. Hal 10

⁴⁸ Ibid. Hal 11